

Analisis Rasio Laporan Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Situbondo

Analysis Of Financial Statement Ratio Of Revenue And Expenditures Budget To Assess Government Financial Performance In Situbondo District

Naela Alfi Saha

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember (UNEJ)

Jln. Kalimantan 37, Jember 68121

E-mail: naela.alfi@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Situbondo menggunakan Analisis Rasio Keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa Laporan Realisasi Anggaran APBD tahun anggaran 2010 hingga tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan Rasio Kemandirian menunjukkan Pemerintah Kabupaten Situbondo masuk dalam kategori instruktif, Rasio Efektivitas menunjukkan Pemerintah Kabupaten Situbondo terbilang efektif, Rasio Efisiensi menunjukkan Pemerintah Kabupaten Situbondo kurang efisien, Rasio keserasian menunjukkan Pemerintah Kabupaten Situbondo masih didominasi oleh belanja rutin, *Debt Service Coverage Ratio* menunjukkan Pemerintah Kabupaten Situbondo Mampu untuk melakukan pinjaman, Rasio Pertumbuhan PAD menunjukkan Pemerintah Kabupaten Situbondo setiap tahun mengalami kenaikan, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal menunjukkan Pemerintah Kabupaten Situbondo tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat masih sangat kurang.

Kata kunci: Analisis Rasio Keuangan APBD, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Abstract

This study aims to analyze the Government's Financial Performance Situbondo using Financial Ratio Analysis of the Regional Budget (APBD). This type of research used in this research is descriptive quantitative approach. The data used in this study are primary data in the form of budget Budget Realization Report fiscal year 2010 to 2014. The results showed self-reliance ratio indicates Situbondo regency government in the category instructive, showing Government Effectiveness Ratio Situbondo fairly effective, the Government Efficiency Ratio shows Situbondo less efficient, ratio harmony shows the Government Situbondo still dominated by routine expenditure Debt Service Coverage ratio indicates the Government Situbondo Being able to make loans, Growth ratio PAD indicates the Government Situbondo each year has increased, ratio degree of Fiscal Decentralization shows the Government Situbondo level of authority and the responsibilities given by the central government is still lacking.

Keywords : Financial Ratio Analysis Budgets , Financial Performance Government District.

Pendahuluan

Pada era berakhirnya Orde baru tahun 1998 menyebabkan banyak perubahan dalam pemerintahan Indonesia. Perubahan tersebut tidak hanya terjadi di Pemerintah Pusat tetapi juga terjadi pada Pemerintah Daerah. Setelah era reformasi sistem Pemerintahan Indonesia awalnya bersifat terpusat menjadi desentralisasi. Perubahan tersebut ditandai dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan menjadi harapan baru bagi Indonesia. Peraturan tersebut menjadi

landasan bagi pemberian otonomi daerah yang semakin besar kepada daerah, sehingga Pemerintah Daerah dituntut untuk meyenggarakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Otonomi daerah dilaksanakan sejak 1 Januari 2001.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberi wewenang menjalankan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya dalam bentuk laporan keuangan yang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri atas laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial,

sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam APBD yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 menetapkan bahwa APBD disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai. Untuk mendukung kebijakan ini perlu dibangun suatu system yang dapat menyediakan data dan informasi untuk menyusun APBD dengan pendekatan kinerja. Anggaran Kinerja pada dasarnya merupakan pembangunan suatu sistem penganggaran yang dapat memadukan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan sehingga akan terlihat adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan. Adapun kinerja tersebut harus mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan public, yang berorientasi pada kepentingan publik (*public oriented*). Pemerintah daerah sebagai pihak yang disertai tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Hasil analisis rasio keuangan ini selanjutnya digunakan untuk tolak ukur dalam (Abdul Halim, 2007:230) : 1). Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, 2). mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, 3). Mengukur sejauh mana aktivitas daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, 4). Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah, 5). Melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Artikel Ilmiah Mahasiswa 2016

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah kabupaten Situbondo pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 berdasarkan rasio laporan keuangan.

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah kabupaten Situbondo pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 berdasarkan rasio laporan keuangan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian untuk mempelajari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo selama tahun anggaran 2010 hingga tahun 2014 untuk menilai kinerja keuangan daerah. Penelitian ini termasuk dalam penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada dan berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau yang dikaji secara kuantitatif. Menurut Nazir (2005) tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat atau hubungan antar fenomena yang diselidiki. Maksimalisasi objektivitas desain penelitian ini dilakukan dengan menggunakan angka-angka, pengolahan statistik, struktur dan percobaan terkontrol (Hamdi, 2014:5). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dilihat dari perhitungan Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas dan Efisiensi, Rasio Keserasian, *Debt Service Coverage Ratio*, Rasio Pertumbuhan dan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari berbagai periode tahun. Sehingga peneliti mengambil sampel yang digunakan untuk penelitian yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Situbondo pada tahun 2010 sampai tahun 2014.

Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian (Indriantoro, 2009:146-147). Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintah Kabupaten Situbondo berupa Laporan Realisasi Anggaran pada periode tahun 2010 hingga 2014, sumber data tersebut didapat dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Situbondo.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Dokumenter

Data Dokumenter adalah jenis data penelitian yang antara lain berupa faktur, jurnal, surat-surat, notulen hasil rapat, memo, atau dalam bentuk laporan program. Data dokumenter memuat apa dan kapan suatu kejadian atau transaksi, serta siapa yang terlibat dalam kejadian (Indriantoro, 2009: 146). Dalam penelitian ini dokumen yang dibutuhkan adalah laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Situbondo yang dipublikasikan berupa Laporan Realisasi Anggaran pada periode tahun 2010 hingga tahun 2014.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian. Teknik wawancara dilakukan jika peneliti memerlukan komunikasi atau hubungan dengan responden (Indriantoro, 2009:152). Wawancara dilakukan terhadap aparat dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Situbondo.

Metode Analisis Data

1. Rasio Kemandirian Keuangan daerah =

$$\frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan Pemeritnah Pusat/Provinsi}} \times 100\%$$

2. Rasio efektivitas =

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

3. Rasio efisiensi =

$$\frac{\text{Biaya memungut PAD}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

4. Rasio keserasian

a) Rasio belanja rutin/operasi= $\frac{\text{Belanja rutin/operasi}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$

b) Rasio belanja modal = $\frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$

5. Rasio DSCR =

$$\frac{\text{PAD} + \text{Dana Bagi Hasil} + \text{DAU} - \text{Belanja Wajib}}{\text{Angsuran Pokok Pinjaman} + \text{Bunga} + \text{Biaya Lain}}$$

6. Rasio pertumbuhan =

$$\frac{\text{PAD}_{t1} - \text{PAD}_{t0}}{\text{PAD}_{t0}} \times 100\%$$

7. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal =

$$\frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Kemandirian

Rasio Kemndirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian maka mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan terhadap bantuan eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya (Halim, 2007).

Tabel 1. Kriteria Rasio Kemandirian

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	>25 – 50	Konsultatif
Sedang	>50 -75	Partisipasif
Tinggi	>75 - 100	Delegatif

Sumber : Halim 2001 : 168 dalam Joko, 2012

Tabel. 2 Perhitungan Rasio kemandirian

Tahun	PAD (Rp)	Bantuan pemerintah pusat/Provinsi dan Pinjaman (Rp)	Rasio Kemandirian (%)	Rata-rata
2010	46.579.946.273,78	608.076.571.861,00	7,6	7,75
2011	61.761.290.501,85	762.533.004.309,00	8,1	
2012	67.050.480.515,22	869.976.093.398,00	7,7	
2013	78.043.407.931,91	1.014.348.555.495,00	7,6	
2014	129.640.577.933,62	1.156.284.408.115,00	11,2	

Sumber : Data sekunder diolah

Rasio Efektivitas dan Efisiensi

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemda dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang diterapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal satu atau 100 persen. Namun demikian, semakin tinggi rasio efektivitas, maka kemampuan daerah pun semakin baik (Halim, 2007).

Tabel 3. Kriteria Rasio Efektivitas

Efektivitas Keuangan Daerah Otonom Dan Kemampuan Keuangan	Rasio efektivitas (%)
Tidak efektif	X<100%
Efektif berimbang	X=100%
efektif	X>100%

Sumber : Moh. Mahsun, 2006 dalam Joko, 2012

Hasil Penelitian

Tabel 4. Perhitungan Rasio Efektivitas

Tahun	Anggaran PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Rasio Efektivitas (%)	Rata-rata (%)
2010	43.033.091.813,37	46.579.946.273,78	108,24	110,82
2011	53.045.739.663,99	61.761.290.501,85	116,43	
2012	60.590.209.445,40	67.050.480.515,22	110,66	
2013	73.190.222.487,42	78.043.407.931,91	106,63	
2014	115.603.036.102,25	129.640.577.933,62	112,14	

Sumber : Data sekunder diolah

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari satu atau dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja penda sangat baik.

Tabel 5. Kriteria Rasio Efisiensi

Efisiensi Keuangan Daerah Otonom Dan Kemampuan Keuangan	Rasio efisiensi (%)
Tidak efisien	>100%
Kurang efisien	90%-100%
Cukup efisien	80%-90%
efisien	60%-80%
Sangat efisien	>60%

Sumber : Kepmendagri no. 690.900.327 dalam Joko, 2012

Tabel 6. Perhitungan Rasio Efisiensi

Tahun	Biaya yg dikeluarkan untuk memungut Pendapatan (Rp)	Realisasi Penerimaan Pendapatan (Rp)	Rasio Efisiensi (%)	Rata-rata (%)
2010	689.729.076.683,91	680.876.876.035,78	101,3	98,726
2011	838.589.264.436,03	855.715.430.310,85	97,99	
2012	927.268.554.210,69	979.961.442.413,22	94,62	
2013	1.150.103.067.652,69	1.109.471.305.726,91	103,66	
2014	1.305.647.017.406,14	1.359.193.724.048,62	96,06	

Sumber : data sekunder diolah

Rasio Keceriasan

Rasio keserasian menggambarkan bagaimana penda memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

Tabel 7. Perhitungan Rasio Keceriasan Belanja Operasional/Rutin

Tahun	Belanja Operasi/Rutin (Rp)	Total APBD (Rp)	Rasio Belanja Operasi dibanding Total APBD (%)	Rata-rata (%)
2010	603.307.935.156,64	689.729.076.683,91	87,47	81,602
2011	717.135.950.082,03	838.589.264.436,03	85,51	
2012	771.244.511.796,14	927.268.554.210,69	83,17	
2013	884.471.142.333,85	1.150.103.067.652,69	76,9	
2014	978.829.190.783,14	1.305.647.017.406,14	74,96	

Sumber : data sekunder diolah

Tabel 8. Perhitungan Rasio Keceriasan Belanja Modal/Investasi

Tahun	Belanja Modal/Investasi (Rp)	Total APBD (Rp)	Rasio Belanja Modal dibanding Total APBD (%)	Rata-rata (%)
2010	85.925.600.152,87	689.729.076.683,91	12,45	18,306
2011	120.719.312.264,00	838.589.264.436,03	14,39	
2012	155.800.530.132,00	927.268.554.210,69	16,8	
2013	264.570.994.896,27	1.150.103.067.652,69	23	
2014	325.053.037.623,00	1.305.647.017.406,14	24,89	

Sumber : data sekunder diolah

Debt Coverage Service Ratio

Dalam rangka melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana di daerah, selain menggunakan PAD, penda dapat menggunakan alternatif sumber dana lain melalui pinjaman, sepanjang prosedur dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. DCSR merupakan perbandingan antara penjumlahan PAD, Bagian Daerah (BD) dari pajak bumi dan bangunan, Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), penerimaan sumber daya alam, dan bagian daerah lainnya serta Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi Belanja wajib (BW), dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga, dan pinjaman lainnya yang jatuh tempo (Halim, 2008).

Tabel 9. Perhitungan Rasio Kekerasan

Tahun	PAD	DBH-Pajak	DBH- bkn Pajak	DAU	Belanja wajib	Anggaran Pokok Hutang	Belanja Bunga+Biaya Lainnya	Rasio DCSR (%)
2010	46.579.946.273,78	35.522.939.461	12.832.157.528	447.609.618.000	445.023.781.738	31.440.500,16	603.307.935.156,64	16,16
2011	61.761.290.501,85	33.711.165.357	18.150.632.478	515.752.127.000	508.502.647.129,58	31.440.500,18	717.135.950.085,03	16,85
2012	67.050.480.515,22	37.192.233.368	27.654.205.946	616.093.730.000	564.215.933.004,54	136.032.750,26	771.244.511.796,14	23,82
2013	78.043.407.931,91	35.796.455.530	29.949.440.210	692.549.026.000	619.282.087.404	0	884.471.142.333,85	24,54
2014	129.640.577.933,62	27.546.242.322	43.971.847.472	766.542.999.000	682.568.345.810,42	166.708.210,35	978.829.190.783,14	29,12

Sumber : data sekunder diolah

Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemda dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya. Diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi yang perlu mendapat perhatian.

Tabel 10. Perhitungan Rasio Pertumbuhan

Tahun	Pertumbuhan Realisasi Penerimaan PAD (%)	Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah (%)	Pertumbuhan Realisasi Belanja Pembangunan (%)	Pertumbuhan Realisasi Belanja Rutin (%)
2010	37,35	11,48	-30,07	19,43
2011	32,59	25,67	40,49	18,86
2012	8,56	14,51	29,06	7,54
2013	16,39	13,21	69,81	14,68
2014	66,11	22,5	22,86	10,66

Sumber : data sekunder diolah

Rasio Desentralisasi Fiskal

Rasio Derajat Desentralisasi fiskal adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggungjawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Menurut Mahmudi (2010) dalam Astriana, 2014 , derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli daerah dengan Total Penerimaan Daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD, semakin tinggi juga kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

Tabel 11. Kriteria Rasio Derajat Desentralisasi

Persentase PAD Terhadap TPD (%)	Kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber : Anita Wulandari (2001:22) dalam Adhastia, 2012

Artikel Ilmiah Mahasiswa 2016

Tabel 12. Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Desentralisasi Fiskal (%)	Rata-rata (%)
2010	46.579.946.273,78	680.876.876.035,78	6,84	7,49
2011	61.761.290.501,85	855.715.430.310,85	7,21	
2012	67.050.480.515,22	979.961.442.413,22	6,84	
2013	78.043.407.931,91	1.109.471.305.726,91	7,03	
2014	129.640.577.933,62	1.359.193.724.048,62	9,53	

Sumber : data sekunder diolah

Pembahasan

Rasio Kemandirian

Dari hasil perhitungan rasio Kemandirian pada tabel 2 terlihat bahwa Pemerintah Kabupaten Situbondo mengalami peningkatan setiap tahunnya, puncaknya pada tahun 2014 meningkat drastis sebesar 11,2 %, meskipun sempat mengalami penurunan sebesar 7,6 % pada tahun 2013. Namun, adanya peningkatan rasio kemandirian tersebut tingkat kemandirian Kabupaten Situbondo tergolong masih rendah atau tergolong instruktif. Hal ini dapat diartikan bahwa keuangan Kabupaten Situbondo sebagian besar masih bergantung pada pendapatan eksternalnya.

Pemerintah Kabupaten Situbondo belum mampu meningkatkan pendapatan asli daerahnya (PAD) secara maksimal. Peran pemerintah daerah disini adalah berupaya untuk meningkatkan kinerjanya berupa meningkatkan sumber pendapatan daerah berupa pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan lain-lain asli daerah yang sah. selain untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah, tindakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan tingkat kemandirian daerah dengan meningkatkan jumlah PAD yang diterima oleh daerah untuk melaksanakan belanja atau pembiayaan untuk aktivitas/program pemerintah, serta dapat membantu pemerintah pusat untuk menyukseskan pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan peraturan Nomor 32 Tahun 2004.

Rasio Efektivitas dan Efisiensi

Berdasarkan tabel 4 dari perhitungan rasio efektivitas keuangan pemerintah Kabupaten Situbondo selama enam tahun terhitung dari tahun 2010 sampai 2014 rata-rata di atas 100 persen tepatnya sebesar 111,7 %. Rasio tertinggi yang pernah dicapai oleh Kabupaten Situbondo pada tahun 2011 sebesar 116,43 %, Meskipun rasio efektivitas Kabupaten Situbondo pada enam tahun terakhir mengalami fluktuasi. Sehingga dilihat dari hasil perhitungan rasio efektivitas, tingkat efektivitas kinerja keuangan pemerintah kabupaten Situbondo dapat dikatakan sangat baik.

Hasil dari perhitungan analisis rasio efektivitas mengartikan bahwa pemerintah kabupaten Situbondo memiliki kemampuan/potensi yang baik dalam kinerja

merealisasikan PAD yang telah direncanakan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Dalam hal ini pemerintah sudah memaksimalkan segala upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan realisasi pendapatan asli daerahnya (PAD).

Berdasarkan tabel 6 dari hasil perhitungan rasio efisiensi pada tahun 2010 sebesar 101,30 menandakan bahwa kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Situbondo masih tidak efisien karena hasil perhitungannya melebihi angka 100 persen. Namun pada tahun 2011 dan tahun 2012 tingkat efisiensi keuangan daerah meningkat menjadi 97,99 dan 94,62, namun dengan angka tersebut kabupaten Situbondo masih berada dalam kriteria kurang efisien. Sedangkan pada tahun 2013 dan 2014 mengalami fluktuasi dengan hasil rasio menunjukkan kabupaten Situbondo masih tidak efisien dalam mengelola keuangannya.

Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Situbondo masih belum mampu untuk memaksimalkan kinerja dalam menghasilkan pendapatan yang optimal jika dibandingkan dengan kegiatan belanja untuk menghasilkan pendapatan daerahnya. Pemerintah daerah cenderung melakukan belanja daerah yang besar tanpa diikuti dengan peningkatan jumlah pendapatan daerah yang meningkat, sehingga pemerintah belum efisien untuk melaksanakan keuangan daerahnya meskipun pemerintah daerah dapat merealisasikan Pendapatan daerahnya lebih dari target/rencana pendapatannya.

Rasio Keserasian

Berdasarkan tabel 7 dan 8 menunjukkan bahwa belanja operasi malah lebih besar dari belanja modal yang umumnya digunakan daerah untuk pembangunan. Dari hasil rasio diatas malah belanja operasi/rutin mendominasi pengeluaran Kabupaten Situbondo. Ini menandakan bahwa tingkat keserasian antara belanja modal dan belanja operasi belum optimal.

Dalam perhitungan tersebut maka dapat diartikan bahwa pemerintah kabupaten Situbondo lebih cenderung membelanjakan keuangannya untuk belanja rutin daripada belanja pembangunan yang berarti belanja pembangunan yang digunakan untuk sarana dan prasarana ekonomi yang dipergunakan untuk masyarakat cenderung kecil. Seharusnya pemerintah dapat memprioritaskan alokasi dananya lebih optimal kepada belanja pembangunan sesuai dengan kebutuhan pembangunan yang dibutuhkan oleh daerah.

Debt Coverage Service Ratio

Berdasarkan tabel 9 hasil dari perhitungan DCSR pemerintah Kabupaten Situbondo selama enam tahun berturut-turut menghasilkan rasio semuanya lebih dari yang ditentukan oleh pemerintah yaitu sebesar 2,5%. Dapat dikatakan bahwa pemerintah Kabupten Situbondo memiliki kemampuan yang baik untuk membayar kembali pinjamannya.

Melihat dari rata-rata hasil analisis tersebut sebesar 22,098% sehingga Kabupaten Situbondo dalam melaksanakan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat daerah anggaran dananya dapat diperoleh dari alternatif lain atau dari pinjaman. Karena Kabupaten Situbondo memiliki kemampuan yang dangat baik untuk megembalikan pinjaman yang telah dilakukan.

Rasio Pertumbuhan

Berdasarkan hasil perhitungan analisis rasio pertumbuhan yang dapat dilihat pada tabel 10 menunjukkan bahwa pertumbuhan dilihat dari segi jumlah realisasi PAD, realisasi pendapatan daerah dan realiasi belanja pembangunan terus mengalami fluktuasi. Disisi lain, pemerintah daerah menunjukkan usahanya untuk terus memperbaiki kinerjanya. Seperti pada pertumbuhan realisasi PAD pada tahun 2012 hanya sebesar 8,56%, lalu pemerintah berupaya untuk memperbaiki penerunan pertumbuhan tersebut dan pada akhirnya pada tahun 2013 rasio pertumbuhannya naik sebesar 16,39% dan puncaknya pada tahun 2014 sebesar 66,11%. Untuk meningkatkan pertumbuhan PAD nya pemerintah dapat melakukan optimalisasi pendapatan retribusi daerah dan pajak daerah. Hal yang sama juga terjadi pada pertumbuhan realisasi pendapatan daerah yang mengalami fluktuasi. Jumlah terendah yang pernah dialami pada tahun 2010 hanya sebesar 11,48% dan puncaknya tertinggi pada tahun 2011 sebesar 25,67%. Serta untuk pertumbuhan belanja pembangunan tak luput dari fluktuasi jumlah rasio pertumbuhan tersebut, namun puncak tertingginya pada tahun 2013 sebesar 69,81%. Sedangkan untuk pertumbuhan belanja rutin/operasional mengalami penurunan yang dapat diartikan bahwa pemerintah Kabupaten Situbondo semakin meningkatkan kegiatan pembangunan untuk kebutuhan daerahnya. **Rasio**

Desentralisasi Fiskal

Berdasarkan tabel 12 hasil analisis rasio desentralisasi fiskal menunjukkan bahwa rata-rata perhitungan analisis tersebut terhitung dari tahun anggaran 2010 sampai tahun anggaran 2014 sebesar 7,16% atau dapat dikatakan bahwa pemerintah Kabupaten Situbondo belum dapat mengoptimalkan pengelolaan PAD nya untuk melakukan kewenangan mengatur dan membangun daerahnya. Sehingga untuk melakukan otonomi daerah Kabupaten Situbondo masih membutuhkan transfer dana pusat dan provinsi untuk melakukan kegiatan pemerintahan. Selain itu Situbondo juga termasuk kabupaten yang memiliki status daerah tertinggal. Untuk terlepas dari status dara tertinggal, maka pembangunan di kabupaten Situbondo perlu ditingkatkan. Ada enam aspek yang harus dilakukan untuk mengentaskan kabupaten Situbondo agar masalah daerah tertinggal dapat diatasi yaitu diantaranya, pembangunan manusia, pendidikan, kesejahteraan, rehabilitas jangan sampai terisolir dari lingkungan di daerahnya.

Kesimpulan dan Keterbatasan

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah peneliti jelaskan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Hasil perhitungan Rasio Kemandirian terhadap Pemerintah Kabupaten Situbondo selama tahun anggaran 2010 hingga tahun 2014 sebesar 8,1%, angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemandirian Pemerintah Daerah masuk dalam kategori pola hubungan instruktif, hasil tersebut menunjukkan peran pemerintah pusat lebih mendominasi dalam melaksanakan otonomi daerahnya.

Hasil dari analisis Rasio Desentralisasi Fiskal selama lima tahun anggaran sebesar 7,16 % bahwa Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggungjawab yang diberikan pemerintah pusat masih sangat kurang.

Rasio Kemandirian dan Rasio Desentralisasi Fiskal mengacu pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai dasar perhitungan untuk menggambarkan kinerja Pemerintah Kabupaten Situbondo. Untuk mengetahui naik dan turunnya PAD di Kabupaten Situbondo dapat digambarkan dengan analisis Rasio Pertumbuhan, selama lima tahun anggaran dari tahun 2010 hingga 2014 mengalami fluktuasi, puncaknya realisasi PAD tertinggi pada tahun 2014 sebesar 66,11 %, namun kenaikan PAD tersebut masih belum mampu menghantarkan Kabupaten Situbondo mandiri dalam kegiatan otonomi daerahnya dan peran Pemerintah Pusat masih mendominasi.

Dalam melakukan kegiatan otonomi daerah, selain dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah juga dapat membiayai kegiatan otonomi dengan cara melalui pinjaman. Dari hasil Debt Coverage Service Ratio Kabupaten Situbondo memiliki hasil rata-rata 22,09% hasil ini lebih dari batas dari pemerintah pusat sebesar 2,5% sehingga Kabupaten Situbondo dalam melaksanakan pembiayaan kegiatan pemerintahan dapat melalui pinjaman.

Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Situbondo selama tahun anggaran dari tahun 2010 hingga tahun 2014, jika dilihat tingkat keefektivannya, pemerintah Kabupaten Situbondo memiliki kinerja keuangan yang efektif, itu dibuktikan dengan hasil perhitungan Rasio Efektivitas sebesar 110,82 % yang masuk kategori efektif dalam merealisasikan target PAD yang sudah direncanakan. Namun, dalam perhitungan Rasio Efisiensi yang hasilnya sebesar 98,72% masuk kategori kurang efisien. Menandakan bahwa Kabupaten Situbondo masih belum mampu mengelola belanja daerah yang bertujuan untuk pembangunan daerah. Sehingga pengeluaran daerah lebih banyak dari pada pendapatan yang diterima.

Perhitungan Rasio Keserasian yang membandingkan antara belanja modal dan belanja rutin perbandingan tersebut 81,6% untuk belanja rutin sedangkan 18,3% untuk belanja modal, perbandingan tersebut masih jauh lebih besar belanja rutin. Sehingga belanja pembangunan yang dibutuhkan untuk daerah yang dapat meningkatkan PAD dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat belum terlaksana dengan baik.

Keterbatasan

Penelitian ini mempunyai keterbatasan yang mempengaruhi hasil penelitian. Keterbatasan tersebut adalah Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan rasio keuangan yang diterapkan di pemerintah, namun, rasio ini belum menggambarkan bagaimana kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan. Karena penelitian ini hanya dapat menilai kinerja pemerintah dari segi keuangan saja.

Penilaian kinerja pemerintah dalam penelitian ini hanya berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran dari tahun 2010 hingga 2014, sehingga untuk menilai segi keuangan pemerintah daerah belum bisa dijadikan pedoman atau dasar untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini membutuhkan masih banyak informasi terkait dengan proses perencanaan anggaran hingga realisasi anggaran. Saran dan rekomendasi yang dapat diberikan sebagai hasil dari penelitian ini adalah Bagi peneliti selanjutnya, yang ingin meneliti kinerja keuangan daerah sebaiknya mempertimbangkan untuk menambah komponen dokumen dan pengukuran yang akan dipakai. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah metode penelitian ini dengan pendekatan kualitatif guna menjelaskan secara mendalam tentang kinerja keuangan daerah dengan pihak terkait dan dokumen pendukung. Untuk peneliti selanjutnya, untuk penelitian tentang kinerja keuangan dapat dipadukan dengan penambahan variabel yang diteliti seperti sumber daya manusia atau segi ketaatan pemerintah daerah terhadap peraturan pemerintah.

Daftar Pustaka

- Adisasmita, Raharjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi keuangan Daerah : Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta
- Hamdi S Asep, Baharudin E. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan*. Deepublish Publisher. Yogyakarta..
- Indriyantoro N., Supomo B. 2009. *Metodologi Penelitian: untuk Akuntansi dan Manajemen*. BPFE Yogyakarta. Yogyakarta.
- Pramono, Joko. 2012. *Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Akuntansi. STIE AMA Salatiga.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 *Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintah Daerah*
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan*